

SUMMARY DISTRICT CITIZEN ENGAGEMENT PLAN

PROPINSI SULAWESI TENGGARA

Kabupaten Buton

Visi Bersama : Buton Sejahtera 2013

Semua warga di Kabupaten Buton (khususnya orang miskin, perempuan dan yang terpinggirkan) memiliki akses pada pelayanan publik (khususnya air bersih, pendidikan dan kesehatan, listrik, jalan). Ekonomi berkembang dan bergerak atas inisiatif rakyat sehingga dapat menjamin pemenuhan kebutuhan rakyat, dan pemerintah daerah mendukung upaya tersebut dengan segenap sumber daya dan kemampuan yang dimilikinya. Pengelolaan sumber daya alam diarahkan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat (teristimewa orang miskin, perempuan dan yang terpinggirkan) dengan cara yang menjamin kelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup. Sarana dan prasarana dasar menjangkau seluruh desa dan warga.

Warga sadar dan aktif dalam proses pengambilan keputusan baik dalam organisasi warga sendiri maupun di tingkat desa sampai kabupaten. Organisasi warga akan dikelola dengan cara yang demokratis, yaitu transparan, bebas korupsi, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, adil dan partisipatif. Organisasi warga selalu berupaya mengembangkan kemampuan anggota sesuai dengan kepentingan konstituennya.

Organisasi adat berperan aktif mendorong tata pemerintahan yang demokratis. Tokoh organisasi adat dapat menghadapi tantangan perubahan sosial/ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat/warga melalui proses revitalisasi adat.

OMS akan aktif dalam pemberdayaan masyarakat/warga melalui proses kesadaran kritis, pengorganisasian dan mobilisasi sumber daya.

Pemerintah desa berfungsi secara demokratis (transparan, menjamin kesetaraan laki dan perempuan, adil, bebas korupsi, dan partisipatif). Pemerintah desa melahirkan aturan yang menjamin partisipasi masyarakat secara luas. Kebijakan-kebijakan yang dikembangkan selalu berpihak pada masyarakat marjinal. Aparat pemerintah desa selalu mewujudkan sikap arif dan bijaksana, responsif dan melayani masyarakat.

Pemerintah daerah menyediakan pelayanan (baik sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana) yang berkualitas untuk semua warga Buton.

DPRD selalu melahirkan kebijakan, anggaran dan produk hukum yang lain, dengan selalu mengutamakan kepentingan warga/masyarakat (khususnya orang miskin, perempuan dan yang terpinggirkan) dengan cara yang partisipatif dan menerapkan kebijakan tersebut secara tegas, adil, transparan dan bebas korupsi.

Agenda Bersama Kabupaten Buton

1. Kondisi jalan di Buton 2013
2. Revitalisasi fungsi adat
3. Institusi Ekonomi Rakyat
4. Sarana Listrik yang Memadai untuk Masyarakat (Terjangkaunya listrik ke seluruh desa dengan tarif yang dapat dijangkau oleh masyarakat)
5. Pelayanan Pemerintah yang berkualitas
6. SDA dan lingkungan hidup yang berkelanjutan untuk kesejahteraan (Tidak ada lagi perebutan kawasan lahan usaha tani antara masyarakat dan pemerintah)
7. Pelayanan kesehatan yang berkualitas
8. Pendidikan yang berkualitas

Summary Concept Paper

Kabupaten : Buton
Nama Lembaga : Yayasan SINTESA
Judul : Internalisasi Prinsip Tata Pemerintahan Lokal yang Demokratis dalam Pengembangan LED dan PSDA yang Bertumpu pada Aset yang dimiliki pada 12 Kecamatan atau 48 desa di Kabupaten Buton.
Periode Program : 3 tahun

Yayasan Sintesa Buton merancang rencana aksi untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pemanfaatan asset/potensi lokal untuk mengembangkan Lembaga Ekonomi Desa dan melestarikan sumber daya alam dengan menerapkan prinsip tata pemerintahan lokal yang demokratis di 48 desa yang tersebar pada 12 kecamatan di Kab. Buton. Yang utama ingin mendorong kesadaran kritis masyarakat dalam mengembangkan Lembaga Ekonomi Desa secara partisipatif, transparan dan akuntabel untuk mewujudkan kesejahteraan hidup dan pelestarian sumberdaya alam. Hasil yang diharapkan adalah meningkatnya kapasitas anggota dan pengurus dalam menjalankan aturan pengelolaan LED yang disusun berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang demokratis, meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pelestarian SDA, terjadinya pertautan dinamis dengan parapihak yang terkait dengan pengembangan ekonomi masyarakat dan pelestarian SDA mulai dari level desa sampai kabupaten, terkelolanya 48 Lembaga Ekonomi Desa yang mudah di akses oleh masyarakat miskin dan perempuan dengan menerapkan prinsip tata pemerintahan lokal yang demokratis dengan memanfaatkan aset/potensi yang dimiliki, tersedia dan diterapkannya 48 dokumen pelestarian sumber daya alam yang disusun secara partisipatif dan terkelolanya asosiasi pengembangan ekonomi masyarakat dengan menerapkan tata pemerintahan lokal yang demokratis sebagai wadah bersama dalam mengembangkan LED dan melestarikan sumber daya alam. Rencana aksi merancang strategi dalam membangun dengan bertumpu pada sumberdaya-sumberdaya yang ada seperti keterampilan, gagasan dan minat masyarakat, memfasilitasi proses –proses pengembangan kemitraan dengan pihak-pihak terkait.

Kabupaten : Buton
Nama Lembaga : Jaringan Masyarakat Sipil Buton (JMS Buton-lembaga penanggungjawab PELINTAS)
Judul : Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pengelolaan Program Pembangunan sebagai Pintu Masuk dalam Otonomi Desa di Kabupaten Buton
Periode Program : 3 tahun

Jaringan Masyarakat Sipil Buton mengusulkan rencana aksi yang bertujuan meningkatkan keberdayaan masyarakat dan organisasi masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam pengelolaan pembangunan di desa secara partisipatif, transparan dan akuntabel. Melalui rencana aksi ini, JMS Buton ingin melihat hasil-hasil seperti : meningkatnya kesadaran kritis dan pemahaman masyarakat untuk ikut terlibat dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan mulai dari level desa, kecamatan dan kabupaten; Terciptanya pertautan yang dinamis diantara warga, organisasi warga desa dengan pemerintah desa, pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten dan OMS di Kabupaten Buton dalam Pengelolaan Pembangunan di Desa; berkembangnya simpul-simpul belajar di level desa, kecamatan, kabupaten sebagai upaya memperluas pengaruh dalam mendorong perwujudan otonomi desa dan dokumen RPJMDes, RKP Desa dan RAPB Des dihasilkan secara

partisipatif di 21 Desa 3 Kecamatan di Kabupaten Buton. Untuk pencapaian hasil, JMS Buton akan menggunakan strategi pengembangan kapasitas, mendorong pertautan dinamis antar actor, pengorganisasian, advokasi perda ADD dan keberlanjutan program. Dalam konsep paper ini kita bisa mengidentifikasi pihak-pihak seperti kelompok warga atau organisasi warga, dan fasilitator desa yang akan bekerja dengan program untuk mewujudkan perubahan yang diinginkan. Rencana aksi akan dilaksanakan pada 47 desa di 5 kecamatan di Kabupaten Buton.

Kabupaten : Buton
Nama Lembaga : Yayasan Pengembangan Rakyat Indonesia Madani (PRIMA)
Judul : Peningkatan Peran Serta Warga Dan Organisasinya Dalam Mendorong
 Pengelolaan Pendidikan Dasar Yang Adil Dan Berkualitas Pada 7
 Kecamatan Di Kabupaten Buton
Periode Program : 3 tahun

PRIMA merancang rencana aksi untuk menguatkan peran warga dan organisasinya agar mampu mendorong pengelolaan pendidikan dasar yang adil dan berkualitas pada 7 kecamatan di kabupaten buton. Hasil dari rencana aksi ini dikemudian hari adalah terbangunnya relasi yang kuat dan berkualitas diantara kelompok-kelompok masyarakat pada berbagai level pemerintahan, mulai dari level pemerintahan desa, level pemerintahan kecamatan sampai pada level pemerintah Kabupaten yang didukung penuh oleh Jaringan Organisasi Masyarakat Sipil Buton. Meningkatnya kesadaran kritis masyarakat terhadap kualitas pelayanan pendidikan dasar di Kabupaten buton melalui serangkaian kegiatan pengorganisasian diantara kelompok-kelompok masyarakat di 21 desa di Kabupaten Buton. Tersebar nya pembelajaran yang baik di seluruh kecamatan dan desa di kabupaten Buton sebagai upaya warga dan organisasinya mendorong pelayanan pendidikan dasar yang adil dan berkualitas di Kabupaten Buton.Strategi yang akan dikembangkan dalam implementasi gagasan ini adalah : Riset aksi, penguatan kapasitas, pengorganisasian, pendampingan dan menyediakan dialog antar actor. Rencana aksi mengidentifikasi Komite sekolah, Sekolah, Dewan pendidikan, Diknas, BAPPEDA dan DPRD) sebagai pihak-pihak yang akan berinterkasi dalam mewujudkan tujuan rencana aksi agar kebijakan pendidikan benar-benar berpihak kepada masyarakat marginal. Kegiatan ini akan dilakukan pada 7 Kecamatan di Kabupaten Buton yang ditetapkan berdasarkan sebaran jumlah penduduk miskin dan keterwakilan sebaran wilayah kecamatan yang terdiri dari; Kecamatan Lakudo, Kecamatan Batauga, Kecamatan pasarwajo, kecamatan Siotapina, kecamatan Lasalimu, Kecamatan Kapontori, dan Kecamatan kadatua. Masing-masing kecamatan akan ditentukan 3-5 desa.